



REVISI II 2025

Eselon III

Kepala BPTD Kelas II Nusa Tenggara Timur

PERJANJIAN KINERJA

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD)

KELAS II NUSA TENGGARA TIMUR



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II
NUSA TENGGARA TIMUR**

Jl. Prof. Dr. Herman Yohanes
Kota Kupang 85228

Telp : (0380) 8443088

FAX : 0380 – 8443088
Email : bptd13.ntt@gmail.com
Web : www.bptd13ntt.com

Nomor : PR.002/1/06/BPTD Kelas II NTT/2025 Kupang, 1 Desember 2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Hal : Pengajuan Revisi II Perjanjian Kinerja
Tahun 2025

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Bersama ini kami ajukan Dokumen Revisi II Perjanjian Kinerja Kepala BPTD kelas II Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 untuk ditandatangani oleh Bapak Dirjen sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapan terima kasih.



Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
2. Kepala Bagian Perencanaan Setditjen Perhubungan Darat.

Lampiran I Surat Dinas:

Nomor : PR.002/1/06/BPTD Kelas II NTT/2025

Tanggal : 1 Desember 2025

Uraian Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sehubungan dengan adanya revisi anggaran dan adanya perubahan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program pada Draft Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, sehingga perlu dilakukan penyelarasan terhadap Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Balai Pengelola Transportasi Darat.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, maka dilakukan Revisi II Perjanjian Kinerja guna penyempurnaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Nusa Tenggara Timur untuk Tahun Anggaran 2025.



Lampiran II Surat Dinas:

Nomor : PR.002/1/06/BPTD Kelas II NTT/2025

Tanggal : 1 Desember 2025

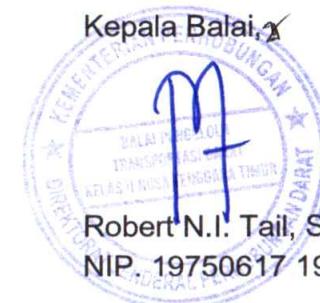
**Revisi II Perjanjian Kinerja
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Nusa Tenggara Timur
Tahun 2025**

KODE SK	SASARAN KINERJA	KODE IKK	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET REVISI I	TARGET REVISI II	URAIAN PERUBAHAN	PENANGGUNG JAWAB
SK 1.1.1	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK 1.1.1.A	Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan	Trayek	36	36	Tetap	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai Danau dan Penyeberangan
SK 1.1.2	Meningkatnya konektivitas layanan terminal tipe A dan layanan AKAP untuk mendukung konektivitas	IKK 1.1.2	Jumlah terminal tipe A yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	1	1	Tetap	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
SK 1.1.3	Meningkatnya konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK 1.1.3	Jumlah Layanan angkutan Antarmoda wilayah KSPN	Trayek	3	1	Perubahan pada targetnya	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai Danau dan Penyeberangan
SK 1.1.4	Meningkatnya Konektivitas layanan angkutan barang dengan terminal angkutan barang	IKK 1.1.4	Jumlah terminal Barang yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	1	1	Tetap	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
SK 1.2.1	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan	IKK 1.2.1B	Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP	Lintasan	10	9	Perubahan pada targetnya	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai Danau dan Penyeberangan
SK 2.1	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan	IKK 2.1.1	Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Unit	1	1	Tetap	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

KODE SK	SASARAN KINERJA	KODE IKK	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET REVISI I	TARGET REVISI II	URAIAN PERUBAHAN	PENANGGUNG JAWAB
		IKK 2.1.2	Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM	Unit	2	2	Tetap	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau Penyeberangan dan Pengawasan
		IKK 2.1.4	Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM	Unit	1	1	Tetap	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau Penyeberangan dan Pengawasan
SK 2.2	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi ASDP	IKK 2.2.2	Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM	Unit	23	10	Perubahan pada targetnya	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau Penyeberangan dan Pengawasan
		IKK 2.2.6	Operasional dan pemeliharaan pengawasan OTP (Ex LPS) di Pelabuhan Penyeberangan	Unit	0	1	IKK digunakan setelah adanya relaksasi anggaran pada bulan Oktober 2025	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau Penyeberangan dan Pengawasan
SK 3.1	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 3.1.1	Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata	Kegiatan	0	1	IKK digunakan setelah adanya relaksasi anggaran pada bulan Oktober 2025	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai Danau dan Penyeberangan
		IKK 3.1.2	Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang	Kegiatan	0	1	IKK digunakan setelah adanya relaksasi anggaran pada bulan Oktober 2025	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau Penyeberangan dan Pengawasan
SK 3.2	Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	IKK 3.2.1	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	Kegiatan	0	1	IKK digunakan setelah adanya relaksasi anggaran pada bulan Oktober 2025	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai Danau dan Penyeberangan
		IKK 3.2.2	Jumlah Alat Uji yang telah dikalibrasi di UPUBKB	Kegiatan	27	13	Perubahan pada targetnya	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai Danau dan Penyeberangan
		IKK 3.2.3	Jumlah Pengadaan Kegiatan Pendukung Uji Kalibrasi	Kegiatan	0	1	IKK digunakan setelah adanya relaksasi anggaran pada bulan Oktober 2025	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai Danau dan Penyeberangan

KODE SK	SASARAN KINERJA	KODE IKK	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET REVISI I	TARGET REVISI II	URAIAN PERUBAHAN	PENANGGUNG JAWAB
SK 3.3	Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK 3.3.1	Jumlah Perlengkapan jalan yang dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis	%	0	1	IKK digunakan setelah adanya relaksasi anggaran pada bulan Oktober 2025	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau Penyeberangan dan Pengawasan
SK 4	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3	3	Tetap	Subbagian Tata Usaha
		IKK 4.2	Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	37	37	Tetap	Subbagian Tata Usaha
		IKK 4.3	Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kemeterian Perhubungan	Kegiatan	2	2	Tetap	Subbagian Tata Usaha
		IKK 4.4	Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	1.562	1.400	pada targetnya	Subbagian Tata Usaha
		IKK 4.5	Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	1	1	Tetap	Subbagian Tata Usaha
		IKK 4.6	Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	23	20	Perubahan pada targetnya	Subbagian Tata Usaha
		IKK 4.7	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	0	1	IKK digunakan setelah adanya relaksasi anggaran pada bulan Oktober 2025	Subbagian Tata Usaha
		IKK 4.8	Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	Bulan	442	1	Perubahan pada satuan dan targetnya	Subbagian Tata Usaha

KODE SK	SASARAN KINERJA	KODE IKK	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET REVISI I	TARGET REVISI II	URAIAN PERUBAHAN	PENANGGUNG JAWAB
		IKK 4.9	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	0	72	digunakan setelah adanya relaksasi anggaran pada bulan Oktober 2025	Subbagian Tata Usaha
		IKK 4.10	Pengembangan SDM Unit Kerja	Orang	35	50	Perubahan pada targetnya	Subbagian Tata Usaha
		IKK 4.11	Kegiatan mendukung Pembangunan ZI	Kegiatan	0	1	IKK digunakan setelah adanya relaksasi anggaran pada bulan Oktober 2025	Subbagian Tata Usaha



Robert N.I. Taib, S.SiT., M.M.
NIP. 19750617 199703 1 007



REVISI II PERJANJIAN KINERJA
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Nusa Tenggara Timur Tahun 2025

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**Revisi II Perjanjian Kinerja
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
Nusa Tenggara Timur
Tahun 2025**

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Engelbertus Langi, A.Md.LLASDP, S.ST(TD)	Penelaah Teknis Kebijakan	01/12/2025	Langi
2.	Diperiksa	Yaan Sem Appah, S.ST (TD), M.M.	Kasubbag Tata Usaha	01/12/2025	Y
3.	Disetujui	Yaan Sem Appah, S.ST (TD), M.M.	Kasubbag Tata Usaha	01/12/2025	Y
4.	Disetujui	Marta Anggoro, S.ST., M.M.Tr.	Kasi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan Dan Pengawasan	01/12/2025	F
5.	Disetujui	Jermias Meda, SE., M.M.	Plt. Kasi Sarana Dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Dan Penyeberangan	01/12/2025	R
6.	Disetujui	Engelberd Leonardo Mailau, S.ST., M.Tr.M	Plt. Kasi Prasarana Dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Dan Penyeberangan	01/12/2025	El



REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Robert Napoleon Isak Tail, S.SI.T., M.M.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Nusa Tenggara Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ahmad Yani, A.T.D., M.T.

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

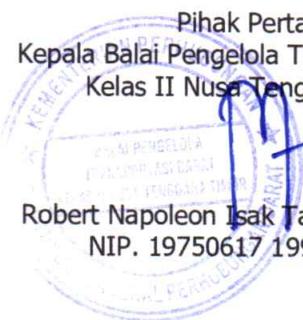
Kupang, 1 Desember 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si.
NIP. 19670131 202521 1

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Nusa Tenggara Timur

Robert Napoleon Isak Tail, S.SI.T., M.M.
NIP. 19750617 199703 1 007



REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II NUSA TENGGARA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

KODE SK	SASARAN KINERJA	KODE IKK	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
SK 1.1.1	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK 1.1.1.A	Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan	Trayek	36
SK 1.1.2	Meningkatnya konektivitas layanan terminal tipe A dan layanan AKAP untuk mendukung konektivitas	IKK 1.1.2	Jumlah terminal tipe A yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	1
SK 1.1.3	Meningkatnya konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK 1.1.3	Jumlah Layanan angkutan Antarmoda wilayah KSPN	Trayek	1
SK 1.1.4	Meningkatnya Konektivitas layanan angkutan barang dengan terminal angkutan barang	IKK 1.1.4	Jumlah terminal Barang yang dibangun dan beroperasi untuk mendukung konektivitas	Unit	1
SK 1.2.1	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan	IKK 1.2.1B	Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP	Lintasan	9
SK 2.1	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan	IKK 2.1.1	Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Unit	1
		IKK 2.1.2	Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM	Unit	2
		IKK 2.1.4	Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM	Unit	1
SK 2.2	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi ASDP	IKK 2.2.2	Jumlah operasional layanan Pelabuhan Penyeberangan sesuai SPM	Unit	9
		IKK 2.2.6	Operasional dan pemeliharaan pengawasan OTP (Ex LPS) di Pelabuhan Penyeberangan	Unit	1

KODE SK	SASARAN KINERJA	KODE IKK	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
SK 3.1	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 3.1.1	Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata	Kegiatan	1
		IKK 3.1.2	Jumlah Kegiatan Pengawasan Operasional Angkutan Barang	Kegiatan	1
SK 3.2	Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi active dan passive safety	IKK 3.2.1	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	Kegiatan	1
		IKK 3.2.2	Jumlah Alat Uji yang telah dikalibrasi di UPUBKB	Kegiatan	13
		IKK 3.2.3	Jumlah Pengadaan Kegiatan Pendukung Uji Kalibrasi	Kegiatan	1
SK 3.3	Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK 3.3.1	Jumlah Perlengkapan jalan yang dipasang sesuai dengan spesifikasi teknis	%	100
SK 4	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3
		IKK 4.2	Kegiatan terkait Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	37
		IKK 4.3	Kegiatan terkait Maturitas SPIP Kemeterian Perhubungan	Kegiatan	2
		IKK 4.4	Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	1400
		IKK 4.5	Tingkat Lanjut Rekomendasi Audit/Pemeriksaan	Dokumen	1
		IKK 4.6	Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Dokumen	20
		IKK 4.7	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan (Skor) Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	1

KODE SK	SASARAN KINERJA	KODE IKK	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
		IKK 4.8	Kegiatan Digitalisasi Arsip (Skor)	Bulan	12
		IKK 4.9	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	72
		IKK 4.10	Pengembangan SDM Unit Kerja	Orang	50
		IKK 4.11	Kegiatan mendukung Pembangunan ZI	Kegiatan	1

Kegiatan

- | | Anggaran |
|--|--------------------|
| 1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat | Rp. 68.710.639.000 |
| 2. Pelayanan Transportasi Darat | Rp. 11.938.336.000 |
| 3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat | Rp. 25.489.654.000 |
| 4. Penunjang Teknis Transportasi Darat | Rp. 201.341.000 |
| 5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat | Rp. 10.331.341.000 |
| 6. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat | Rp. 15.738.227.000 |
| 7. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat | Rp. 21.906.022.000 |

Disetujui
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si.
NIP. 19670131 202521 1

Kupang, 1 Desember 2025
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Nusa Tenggara Timur

Robert Napoleon Isak TaiL, S.SI.T., M.M.
NIP. 19750617 199703 1 007



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT